

Perbandingan Tingkat Efisiensi Bank Syariah Konvensional dan Unit Usaha Syariah: Pendekatan Data Envelopment Analysis

Nurfauzi Latif¹

Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Nur 'Ilmi Al Ismailiyun, Indonesia

Email: nurfauzilatif055@gmail.com

Abstract:

This study aims to compare the efficiency levels of Sharia Commercial Banks (BUS) and Sharia Business Units (UUS) in Indonesia using the Data Envelopment Analysis (DEA) method. The research uses secondary data from 13 BUS and 19 UUS for the 2021–2025 period, sourced from the Financial Services Authority. The results show that BUS has a significantly higher average technical efficiency score of 0.861, compared to 0.789 for UUS. This gap is primarily caused by differences in scale efficiency rather than managerial capability, as UUS faces limitations in operational autonomy and shared cost allocation with its conventional parent bank. These findings support the policy direction of separating UUS into independent entities to strengthen overall industry efficiency.

Keywords: *Sharia Commercial Bank; Sharia Business Unit; Efficiency; Data Envelopment Analysis; Operational Autonomy.*

Introduction

Perkembangan sektor keuangan syariah di Indonesia dalam satu dekade terakhir menunjukkan pertumbuhan yang pesat. Kondisi ini didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap prinsip keuangan yang bebas dari *riba*, *gharar*, dan *maysir*, serta dukungan kebijakan pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memperkuat struktur industri keuangan syariah. Berdasarkan data OJK hingga akhir tahun 2025, total aset perbankan syariah mencapai Rp1.124 triliun dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 12,3%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan perbankan konvensional yang mencapai 8,7% pada periode yang sama (OJK, 2025).

Meskipun mengalami pertumbuhan yang signifikan, industri perbankan syariah di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan negara lain karena beroperasi dalam dua bentuk institusi, yaitu Bank Umum Syariah (BUS) sebagai entitas hukum yang sepenuhnya menerapkan prinsip syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) sebagai unit operasional yang berada di bawah Bank Umum Konvensional (BUK) dengan izin usaha tersendiri, tetapi masih memanfaatkan sebagian sumber daya dari bank induknya (OJK, 2025). Hingga akhir tahun 2025, terdapat 14 BUS dan 20 UUS yang beroperasi di Indonesia. Pangsa pasar BUS mencapai sekitar 58% dari total aset perbankan syariah nasional, sedangkan UUS menguasai sekitar 42% (OJK, 2025).

Perbedaan struktur kepemilikan, tata kelola, akses terhadap sumber daya, serta keleluasaan dalam menentukan strategi bisnis berpotensi memengaruhi kemampuan BUS dan UUS dalam mengelola input operasional untuk menghasilkan output yang optimal, yang tercermin melalui tingkat efisiensi. Sejumlah penelitian menyatakan bahwa UUS memiliki keunggulan karena memperoleh dukungan jaringan kantor, basis nasabah, serta permodalan dari bank induknya sehingga berpotensi mencapai skala ekonomi yang lebih baik. Sebaliknya, penelitian lain menunjukkan bahwa BUS cenderung lebih efisien karena memiliki fokus yang lebih kuat pada

bisnis syariah, tidak bergantung pada kepentingan bisnis konvensional, serta memiliki struktur biaya yang lebih sesuai dengan karakteristik produk dan layanan syariah (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011).

Berdasarkan telaah literatur, penelitian yang secara khusus membandingkan tingkat efisiensi BUS dan UUS menggunakan pendekatan *Data Envelopment Analysis* (DEA) dengan mempertimbangkan karakteristik operasional perbankan syariah pasca kebijakan penguatan industri tahun 2020 masih relatif terbatas (Machmud, A., & Rukmana, D, 2010). Sebagian besar penelitian hanya membandingkan efisiensi antara perbankan syariah dan perbankan konvensional atau hanya berfokus pada salah satu jenis institusi. Selain itu, penelitian sebelumnya umumnya belum memasukkan karakteristik khusus perbankan syariah, seperti rasio pembiayaan bermasalah (*Non-Performing Financing*), proporsi pembiayaan berbasis bagi hasil, dan efisiensi pengelolaan dana sosial sebagai variabel yang memengaruhi tingkat efisiensi. Akibatnya, hasil penelitian yang ada belum mampu menjelaskan secara komprehensif perbedaan efisiensi antara BUS dan UUS (Charnes et al., 1994).

Ketidakpastian mengenai kelompok institusi yang memiliki tingkat efisiensi lebih tinggi menjadi salah satu kendala dalam pengambilan kebijakan. Bagi pemerintah dan OJK, kondisi ini menyulitkan dalam merumuskan kebijakan penguatan dan konsolidasi industri perbankan syariah. Bagi manajemen bank, informasi tersebut penting sebagai dasar dalam menyusun strategi pengembangan bisnis, sedangkan bagi nasabah dan investor, hasil pengukuran efisiensi dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memilih institusi perbankan syariah yang memiliki kinerja terbaik.

Secara teoritis, efisiensi merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kesehatan dan daya saing lembaga keuangan. Dalam konteks perbankan, efisiensi diartikan sebagai kemampuan bank menghasilkan output maksimum dengan penggunaan input tertentu atau menghasilkan output yang sama dengan penggunaan input seminimal mungkin (Coelli et al., 2005; Paradi et al., 2018). Penelitian ini menggunakan pendekatan *Data Envelopment Analysis* (DEA), yaitu metode nonparametrik yang sesuai untuk mengukur efisiensi pada sektor jasa, termasuk perbankan, karena tidak memerlukan asumsi mengenai bentuk fungsi produksi dan mampu menganalisis berbagai jenis input serta output secara simultan (Ascarya & Yumanita, 2006).

Penelitian terdahulu mengenai efisiensi perbankan syariah di Indonesia sebagian besar masih berfokus pada perbandingan antara perbankan syariah dan perbankan konvensional. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tingkat efisiensi kedua sistem perbankan tersebut relatif tidak berbeda secara signifikan, meskipun perbankan syariah memiliki variasi efisiensi yang lebih besar antarbank. Penelitian lain menemukan bahwa sebagian besar UUS memiliki tingkat efisiensi yang masih berada di bawah rata-rata BUS, namun belum mampu menjelaskan faktor-faktor penyebabnya secara terukur. Selain itu, penelitian Putri dan Latifah (2025) yang mengukur efisiensi BUS pada periode 2021–2023 menggunakan pendekatan DEA menunjukkan bahwa efisiensi dipengaruhi oleh skala operasional, strategi manajemen, inovasi teknologi, dan dampak pascapandemi. Meskipun demikian, penelitian tersebut belum melakukan analisis komparatif secara khusus antara BUS dan UUS.

Berdasarkan telaah penelitian terdahulu, masih terdapat beberapa kesenjangan penelitian (*research gap*). Pertama, penelitian sebelumnya belum membedakan secara tegas analisis efisiensi BUS dan UUS sebagai dua bentuk institusi yang memiliki karakteristik organisasi dan operasional yang berbeda. Kedua, sebagian besar penelitian masih menggunakan definisi input dan output yang mengacu pada perbankan konvensional sehingga belum sepenuhnya mempertimbangkan karakteristik khas perbankan syariah, seperti pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, serta proporsi pembiayaan berbasis akad syariah. Ketiga, penelitian sebelumnya belum memperbarui analisis menggunakan data pascapandemi COVID-19 dan pasca implementasi kebijakan penguatan perbankan syariah tahun 2020 yang telah mengubah struktur persaingan industri.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan membandingkan tingkat efisiensi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia menggunakan pendekatan *Data Envelopment Analysis* (DEA) dengan variabel input dan output yang disesuaikan dengan karakteristik operasional perbankan syariah. Penelitian ini menggunakan data periode 2021–2025 sehingga diharapkan mampu memberikan bukti empiris yang lebih mutakhir mengenai perbandingan efisiensi kedua bentuk institusi tersebut. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur mengenai efisiensi perbankan syariah sekaligus menjadi masukan bagi regulator dan praktisi dalam merumuskan kebijakan serta strategi peningkatan kinerja industri perbankan syariah di Indonesia.

Methodology

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif komparatif dengan desain deskriptif-verifikatif. Pendekatan kuantitatif digunakan karena penelitian berfokus pada pengukuran nilai numerik tingkat efisiensi, sedangkan pendekatan komparatif bertujuan membandingkan tingkat efisiensi antara dua kelompok institusi, yaitu Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). Secara deskriptif, penelitian ini menggambarkan karakteristik efisiensi masing-masing kelompok, sedangkan secara verifikatif menguji apakah perbedaan tingkat efisiensi tersebut signifikan secara statistik.

Desain penelitian yang digunakan adalah data panel (panel data design), yaitu pengamatan terhadap seluruh objek penelitian secara berulang selama periode 2021–2025. Desain ini dipilih untuk menangkap dinamika perubahan efisiensi BUS dan UUS seiring perkembangan kondisi ekonomi serta kebijakan di industri perbankan syariah.

Objek penelitian meliputi seluruh Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) yang beroperasi di Indonesia dan terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama periode penelitian. Pemilihan objek tersebut didasarkan pada adanya perbedaan struktur kelembagaan, tata kelola, dan sumber daya antara kedua jenis institusi. Penelitian memiliki cakupan nasional karena menggunakan data seluruh industri perbankan syariah di Indonesia tanpa pembatasan wilayah operasional tertentu.

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh institusi perbankan syariah yang beroperasi di Indonesia pada akhir tahun 2025, yaitu sebanyak 14 Bank Umum Syariah (BUS) dan 20 Unit Usaha Syariah (UUS) yang berafiliasi dengan Bank Umum Konvensional. Diperoleh sampel akhir sebanyak 13 BUS dan 19 UUS, sehingga total unit analisis mencapai 32 institusi dengan total observasi data panel sebanyak 160 titik data selama 5 tahun pengamatan.

Pengukuran efisiensi dilakukan menggunakan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA), yaitu metode nonparametrik yang mengukur efisiensi relatif antar-*Decision Making Unit* (DMU) dengan membentuk *efficient frontier* dari seluruh sampel. Metode ini dipilih karena tidak memerlukan asumsi bentuk fungsi produksi tertentu serta mampu mengakomodasi penggunaan beberapa variabel input dan output secara simultan.

Penelitian ini menggunakan dua model DEA, yaitu model CCR (*Charnes–Cooper–Rhodes*) untuk mengukur efisiensi teknis dengan asumsi *constant returns to scale* (CRS), serta model BCC (*Banker–Charnes–Cooper*) untuk mengukur efisiensi teknis murni dengan asumsi *variable returns to scale* (VRS), sehingga efisiensi akibat skala operasional dapat dibedakan dari efisiensi manajerial.

Orientasi DEA yang digunakan adalah input-oriented, yaitu mengukur sejauh mana penggunaan input dapat diminimalkan tanpa mengurangi tingkat output yang dihasilkan. Nilai efisiensi berada pada rentang 0–1, dengan interpretasi sebagai berikut.

1. Nilai = 1 menunjukkan institusi berada pada kondisi efisien secara relatif.
2. Nilai < 1 menunjukkan institusi belum efisien dan masih memiliki potensi perbaikan.

Setelah skor efisiensi masing-masing institusi diperoleh, dilakukan pengujian perbedaan tingkat efisiensi antara kelompok BUS dan UUS melalui tahapan berikut.

1. Uji normalitas menggunakan Shapiro–Wilk untuk mengetahui apakah data skor efisiensi berdistribusi normal.
2. Apabila data berdistribusi normal, dilakukan Independent Samples t-test untuk membandingkan rata-rata kedua kelompok.
3. Apabila data tidak berdistribusi normal, digunakan Mann–Whitney U Test sebagai alternatif uji nonparametrik.

Seluruh pengujian dilakukan pada tingkat kepercayaan 95% dengan taraf signifikansi $\alpha = 0,05$. Perbedaan efisiensi dinyatakan signifikan apabila nilai *p-value* lebih kecil dari 0,05. Analisis DEA dilakukan menggunakan perangkat lunak MaxDEA Basic 8, sedangkan analisis statistik dilakukan menggunakan IBM SPSS Statistics 26.

Results & Discussion

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efisiensi Bank Umum Syariah (BUS) lebih tinggi secara signifikan dibandingkan Unit Usaha Syariah (UUS). Temuan ini sejalan dengan teori mengenai fokus bisnis (*business focus*) dan tata kelola yang mandiri (*independent governance*), tetapi tidak sepenuhnya mendukung dugaan bahwa dukungan sumber daya dari bank induk secara otomatis menghasilkan efisiensi yang lebih tinggi pada UUS. Secara teoritis, institusi yang memiliki fokus operasional tunggal dan struktur kepemilikan yang jelas cenderung lebih cepat dalam mengambil keputusan serta mengalokasikan sumber daya secara optimal dibandingkan unit usaha yang masih berada di bawah struktur organisasi lembaga lain.

Temuan penelitian ini memperkuat hasil penelitian Pambuko (2019) yang menunjukkan bahwa kebijakan *spin-off* mampu menurunkan rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) pada bank hasil pemisahan, sehingga mengindikasikan peningkatan efisiensi operasional setelah unit usaha berdiri sebagai entitas yang mandiri. Penelitian ini memberikan temuan tambahan bahwa perbedaan efisiensi tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas manajemen,

tetapi juga oleh perbedaan struktur kelembagaan dan skala operasional yang dimiliki masing-masing institusi.

Apabila dibandingkan dengan penelitian Sinatriana (2017) yang dilakukan sebelum implementasi kebijakan penguatan industri perbankan syariah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesenjangan efisiensi antara BUS dan UUS masih tetap terlihat. Salah satu penyebab yang diduga berkontribusi terhadap kondisi tersebut adalah masih tingginya ketergantungan UUS terhadap sistem operasional, kebijakan, dan pembagian biaya dengan bank induknya, sehingga manfaat dukungan sumber daya belum sepenuhnya mampu mengimbangi tambahan beban operasional yang muncul.

Berdasarkan hasil pemisahan nilai efisiensi teknis menjadi efisiensi teknis murni (*pure technical efficiency*) dan efisiensi skala (*scale efficiency*), terdapat beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab BUS memiliki tingkat efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan UUS.

1. Kemandirian dalam pengelolaan biaya dan strategi bisnis.

BUS memiliki kewenangan penuh dalam menyusun rencana bisnis, menetapkan target efisiensi biaya, serta memilih teknologi yang sesuai dengan kebutuhan operasional perbankan syariah. Sebaliknya, sebagian besar UUS masih mengikuti kebijakan anggaran, sistem informasi, dan standar operasional yang ditetapkan oleh bank induk. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan alokasi biaya operasional menjadi kurang proporsional. Sebagai contoh, biaya pemeliharaan sistem teknologi informasi sering kali dibebankan secara bersama meskipun tingkat pemanfaatan layanan syariah relatif lebih kecil dibandingkan layanan konvensional. Selain itu, UUS juga masih menanggung sebagian biaya promosi yang belum sepenuhnya mendukung penguatan merek (*branding*) perbankan syariah.

2. Keleluasaan dalam mengembangkan skala usaha.

Nilai efisiensi skala BUS mencapai 0,944, lebih tinggi dibandingkan UUS yang sebesar 0,889. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar BUS telah beroperasi mendekati skala optimal, sedangkan sejumlah UUS masih berada di bawah skala yang paling efisien. Pengembangan jaringan kantor maupun perluasan pangsa pasar UUS umumnya masih harus mengikuti strategi ekspansi bank induk, sehingga fleksibilitas dalam memperluas layanan syariah menjadi relatif terbatas. Kondisi tersebut menyebabkan biaya tetap per kantor cabang menjadi lebih tinggi karena volume penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan belum mencapai kapasitas optimal.

3. Perbedaan karakteristik pengelolaan risiko dan portofolio pembiayaan.

BUS memiliki keleluasaan yang lebih besar dalam mengembangkan pembiayaan berbasis akad bagi hasil yang berpotensi memberikan tingkat pengembalian lebih tinggi meskipun disertai risiko yang lebih besar. Sebaliknya, sebagian UUS masih lebih banyak menyalurkan pembiayaan melalui akad *murabahah* yang relatif lebih sederhana karena mengikuti kebijakan manajemen risiko bank induk. Akibatnya, kemampuan menghasilkan pendapatan dari aset yang dimiliki cenderung lebih rendah dibandingkan BUS.

Selama periode 2021–2025, kedua kelompok bank sama-sama menunjukkan peningkatan tingkat efisiensi. Rata-rata efisiensi BUS meningkat sebesar 1,75% per tahun, sedangkan UUS mengalami peningkatan rata-rata 2,10% per tahun. Meskipun laju peningkatan UUS relatif lebih

tinggi, perbedaan tingkat efisiensi antara kedua kelompok belum menunjukkan penyempitan yang berarti karena BUS telah memiliki tingkat efisiensi awal yang lebih tinggi.

Temuan ini memberikan implikasi penting bagi kebijakan pengembangan industri perbankan syariah, khususnya terkait kebijakan pemisahan (*spin-off*) Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah yang berdiri sendiri. Dengan status sebagai entitas hukum yang mandiri, UUS berpotensi memperoleh fleksibilitas yang lebih besar dalam pengambilan keputusan strategis, pengelolaan biaya, serta pengembangan usaha sehingga efisiensi operasional dapat meningkat.

Bagi UUS yang masih beroperasi di bawah bank induk, upaya peningkatan efisiensi dapat dilakukan melalui penyempurnaan mekanisme pembagian biaya (*cost sharing*) agar lebih proporsional, peningkatan kewenangan dalam pengembangan teknologi informasi, serta penyusunan strategi pemasaran yang lebih spesifik sesuai karakteristik pasar perbankan syariah.

Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan. Analisis yang dilakukan hanya berfokus pada efisiensi operasional berdasarkan data keuangan sehingga belum mempertimbangkan aspek kualitatif, seperti kualitas tata kelola syariah, tingkat kepuasan nasabah, maupun dampak sosial pembiayaan. Selain itu, penelitian ini juga belum mengelompokkan institusi berdasarkan ukuran aset, sehingga penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan analisis berdasarkan kategori skala usaha agar diperoleh gambaran efisiensi yang lebih komprehensif.

Tabel 1. Nilai rata-rata seluruh sampel selama periode 2021–2025

Variabel	Satuan	Bank Umum Syariah	Unit Usaha Syariah
Input			
Total Dana Pihak Ketiga	Rp. Triliun	58,24	41,79
Biaya Operasional	Rp. Triliun	7,18	5,93
Jumlah Tenaga Kerja	Orang	3.892	2.517
Output			
Total Pembiayaan Disalurkan	Rp. Triliun	65,07	45,13
Pendapatan Operasional Utama	Rp. Triliun	9,65	7,04
Total Aset Produktif	Rp. Triliun	72,36	50,82

Pengukuran dilakukan dengan model CCR (Efisiensi Teknis) dan BCC (Efisiensi Murni/Skala), orientasi input. Nilai berkisar 0-1, semakin mendekati 1 berarti semakin efisien.

Tabel 2. Rata-rata Nilai Efisiensi Periode 2021–2025

Tahun	Efisiensi BUS	Efisiensi UUS
2021	0,821	0,753
2022	0,845	0,779
2023	0,867	0,792
2024	0,883	0,805
2025	0,891	0,818
Rata-rata Keseluruhan	0,861	0,789

Tabel 3. Rincian Jenis Efisiensi (Rata-rata 5 Tahun)

Jenis Efisiensi	BUS	UUS
Efisiensi Teknis (CCR)	0,861	0,789
Efisiensi Murni Manajerial (BCC)	0,912	0,887
Efisiensi Skala Operasional	0,944	0,889

Keterangan Perhitungan:

1. Nilai efisiensi dihitung dengan rumus dasar DEA:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Total Bobot Output}}{\text{Total Bobot Input}}$$

2. Contoh perhitungan untuk BUS pada tahun 2025: rasio output/input mencapai 89,1% dari batas efisiensi terbaik; artinya BUS hanya perlu mengurangi penggunaan input sebesar 10,9% untuk mencapai efisiensi sempurna tanpa mengurangi output.
3. Sedangkan UUS tahun 2025 memiliki rasio 81,8%, sehingga masih ada ruang efisiensi sebesar 18,2%.

Uji Normalitas: Nilai signifikansi Shapiro-Wilk untuk BUS = 0,217 dan UUS = 0,189; keduanya $> 0,05 \rightarrow$ data berdistribusi normal. Uji-t Independen:

1. Nilai t hitung = 4,723
2. Nilai signifikansi (2-tailed) = 0,000
3. Taraf kepercayaan $\alpha = 0,05$

Kesimpulan Uji: Karena nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, maka terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara tingkat efisiensi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Terdapat perbedaan yang nyata dan signifikan. Secara rata-rata selama 5 tahun, Bank Umum Syariah memiliki tingkat efisiensi lebih tinggi sebesar 7,2 poin persentase dibandingkan Unit Usaha Syariah (0,861 berbanding 0,789). Berdasarkan pemisahan jenis efisiensi, ditemukan dua penyebab utama:

1. Fokus operasional: BUS memiliki efisiensi manajerial yang lebih tinggi karena seluruh kebijakan dan alokasi sumber daya sepenuhnya diarahkan pada prinsip syariah, tanpa harus berbagi prioritas dengan bisnis konvensional seperti halnya UUS.
2. Efisiensi skala: BUS telah mencapai skala ekonomi yang lebih optimal, sedangkan sebagian UUS masih beroperasi pada skala yang belum tepat sehingga biaya per unit layanan masih lebih tinggi.

Selama periode 2021–2025, kesenjangan efisiensi menyempit dari 6,8 poin menjadi 7,3 poin lalu turun menjadi 7,0 poin pada tahun terakhir. Ini menunjukkan UUS terus berbenah meskipun belum mampu menyalip kinerja BUS. Hasil penelitian ini berbeda dengan anggapan umum bahwa UUS diuntungkan dukungan modal dan jaringan bank induk. Dukungan tersebut ternyata belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi efisiensi operasional, karena:

1. UUS seringkali harus mengikuti standar biaya dan sistem induk yang tidak sepenuhnya cocok dengan karakteristik produk syariah;
2. Pembagian keuntungan dan alokasi biaya bersama antara UUS dan induk menyulitkan pengendalian biaya secara mandiri;

3. BUS lebih leluasa menyesuaikan struktur biaya dengan perkembangan pembiayaan syariah yang terus tumbuh.

Meskipun demikian, efisiensi manajerial UUS sebenarnya sudah mendekati BUS (selisih hanya 2,5 poin), artinya kemampuan pengelolaan harian UUS sudah cukup baik kendala utamanya ada pada skala operasional yang belum memadai. Hal ini sejalan dengan kebijakan OJK yang mendorong pemisahan UUS menjadi BUS mandiri, karena dengan demikian skala operasional dan fokus manajemen akan meningkat. Data yang menjadi dasar penelitian meliputi:

1. Data Umum Industri

- a. Jumlah BUS dan UUS yang beroperasi per kuartal: 14 BUS dan 20 UUS pada akhir tahun 2025;
- b. Total aset, dana pihak ketiga, dan total pembiayaan yang disalurkan per kelompok institusi;
- c. Pangsa pasar BUS dan UUS terhadap total pasar perbankan syariah nasional.

2. Data Variabel *Input* dan *Output* DEA

Penelitian ini menggunakan pendekatan perantara yang umum digunakan dalam pengukuran efisiensi perbankan, dengan penyesuaian karakteristik syariah:

Jenis Variabel	Nama Variabel	Definisi Pengukuran
Input	Total Dana Pihak Ketiga	Jumlah dana tabungan, deposito, dan investasi dari nasabah (dalam miliar rupiah)
	Total Biaya Operasional	Jumlah beban gaji, biaya pemasaran, biaya teknologi, dan biaya administrasi (dalam miliar rupiah)
	Jumlah Tenaga Kerja	Jumlah pegawai tetap pada masing-masing bank/UUS
Output	Total Pembiayaan Disalurkan	Jumlah pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah, dan akad lain (dalam miliar rupiah)
	Pendapatan Operasional Utama	Pendapatan dari margin keuntungan, bagi hasil, dan jasa pelayanan syariah (dalam miliar rupiah)
	Total Aset Produktif	Jumlah aset yang menghasilkan pendapatan (dalam miliar rupiah)

3. Data Pendukung Karakteristik Institusi

- a. Rasio *Non-Performing Financing* (NPF) per kelompok;
- b. Proporsi pembiayaan bagi hasil terhadap total pembiayaan;
- c. Jumlah kantor cabang dan layanan perbankan digital;
- d. Umur operasional dan skala aset masing-masing institusi.

Seluruh data telah disesuaikan dengan inflasi dan standar akuntansi keuangan syariah yang berlaku di Indonesia. Penggunaan periode 2021–2025 dipilih karena mencakup masa pemulihan ekonomi pasca pandemi serta penerapan penuh kebijakan penguatan perbankan syariah, sehingga hasil yang diperoleh lebih relevan dengan kondisi industri saat ini.

Conclusion

Berdasarkan hasil pengukuran efisiensi menggunakan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA) serta pengujian statistik terhadap data periode 2021–2025, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Terdapat perbedaan tingkat efisiensi yang signifikan secara statistik antara Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia. Rata-rata nilai efisiensi teknis BUS mencapai 0,861, sedangkan UUS sebesar 0,789, sehingga BUS menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya untuk menghasilkan output.
2. Perbedaan tingkat efisiensi tersebut terutama dipengaruhi oleh efisiensi skala operasional, bukan oleh perbedaan kemampuan manajerial. Nilai efisiensi manajerial BUS (0,912) dan UUS (0,887) relatif berdekatan, sedangkan efisiensi skala BUS (0,944) lebih tinggi dibandingkan UUS (0,889). Temuan ini mengindikasikan bahwa keterbatasan skala usaha dan fleksibilitas operasional menjadi faktor utama yang memengaruhi tingkat efisiensi UUS.
3. Dukungan sumber daya dari bank induk belum sepenuhnya mampu meningkatkan efisiensi operasional UUS. Meskipun memperoleh akses terhadap jaringan, modal, dan infrastruktur bank induk, manfaat tersebut diduga belum optimal karena masih terdapat mekanisme pembagian biaya, keterbatasan dalam penyusunan strategi bisnis, serta standar operasional yang belum sepenuhnya disesuaikan dengan karakteristik perbankan syariah.
4. Selama periode 2021–2025, BUS maupun UUS sama-sama menunjukkan tren peningkatan efisiensi. UUS mengalami peningkatan rata-rata 2,10% per tahun, lebih tinggi dibandingkan BUS sebesar 1,75% per tahun. Meskipun demikian, peningkatan tersebut belum mampu menghilangkan kesenjangan efisiensi yang masih terdapat antara kedua kelompok institusi.

Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa implikasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan adalah sebagai berikut.

1. Kebijakan pemisahan (*spin-off*) Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah yang mandiri berpotensi meningkatkan efisiensi operasional. Berdasarkan estimasi hasil penelitian ini, peningkatan efisiensi tersebut diperkirakan dapat mencapai sekitar 5–7%, terutama melalui penguatan efisiensi skala, peningkatan fleksibilitas pengambilan keputusan, dan optimalisasi pengelolaan sumber daya.
2. Regulasi perlu mengatur secara lebih rinci mekanisme pembagian biaya (*cost sharing*) dan alokasi pendapatan antara UUS dan bank induk secara adil, proporsional, dan transparan sehingga tidak mengurangi kinerja operasional UUS selama masa transisi pemisahan.
3. Perlu adanya dorongan bagi UUS untuk mengembangkan sistem informasi, tata kelola, dan strategi operasional yang lebih sesuai dengan karakteristik perbankan syariah, sehingga tidak hanya mengadopsi sistem yang digunakan oleh bank induk.

References

- Ascarya, & Yumanita, D. (2006). Analisis efisiensi perbankan syariah di Indonesia dengan *Data Envelopment Analysis*. *TAZKLA Islamic Finance and Business Review*, 1(2), 1–32. https://www.researchgate.net/publication/316594804_Analisis_Efisiensi_Perbankan_Syariah_di_Indonesia_dengan_Data_Envelopment_Analysis
- Charnes, A., Cooper, W. W., Lewin, A. Y., & Seiford, L. M. (Eds.). (1994). *Data envelopment analysis: Theory, methodology, and application*. Kluwer Academic Publishers. <https://doi.org/10.1007/978-94-011-0637-5>
- Coelli, T. J., Rao, D. S. P., O'Donnell, C. J., & Battese, G. E. (2005). *An introduction to efficiency and productivity analysis* (2nd ed.). Springer. <https://doi.org/10.1007/b136381>
- Machmud, A., & Rukmana, D. (2010). *Bank syariah: Teori, kebijakan, dan praktik*. Erlangga.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). *Laporan perkembangan industri keuangan syariah Indonesia 2025*. <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/default.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20 Tahun 2025 tentang kewajiban pemenuhan rasio kecukupan likuiditas dan rasio pendanaan stabil bersih bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*. <https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-20-Tahun-2025-Kewajiban-Pemenuhan-Rasio-Kecukupan-Likuiditas-dan-Rasio-Pendanaan-Stabil-Bersih-Bagi-BUS-UUS.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). *Statistik perbankan syariah Indonesia periode 2021–2025*. <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/default.aspx>
- Pambuko, Z. B. (2019). Kebijakan *spin-off* dan efisiensi perbankan syariah di Indonesia. *Ibtifaḥ: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*, 2(1), 21–38. <https://doi.org/10.12928/ijiefb.v2i1.822>
- Paradi, J. C., Sherman, H. D., & Tam, F. K. (2018). *Data envelopment analysis in the financial services industry: A guide for practitioners*. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-69725-3>
- Putri, R. A., & Latifah, F. N. (2025). Analisis efisiensi Bank Umum Syariah dengan metode *Data Envelopment Analysis* periode 2021–2023. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 6(5), 1498–1510. <https://doi.org/10.47467/elmal.v6i5.7152>
- Sinatriona, K. (2017). Analisis perbandingan efisiensi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) dengan metode *Data Envelopment Analysis*. *Parsimonia: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 3(3), 29–39. <https://doi.org/10.33479/parsimonia.v3i3.38>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. (2011). <https://peraturan.go.id/uu-no-21-tahun-2011>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. (2023). <https://peraturan.go.id/uu-no-4-tahun-2023>